

Implementasi Program Bumdes Untuk Menumbuhkan Ekonomi Kreatif Masyarakat (Desa Papar, Kecamatan Papar Kabupaten Kediri)

Lilik Zumrotus S

*Administrasi Negara, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Surel: Liliekh26@gmail.com*

Adi Susiantoro

*Administrasi Negara, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Surel: adisusiantoro7@gmail.com*

Yusuf Hariyoko

*Administrasi Negara, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Surel: yusufhari@untag-sby.ac.id*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Implementasi program BUMDes di Desa Papar Kabupaten Kediri untuk mm engembangkan ekonomi kreatif masyarakat dan Untuk mengetahui apa program BUMDes ini bisa menumbuhkan ekonomi kreatif masyarakat. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan. Sumber data yang digunakan peneliti adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah wawancara kepada informan yang dianggap berpotensi untuk memberikan informasi tentang proses pengelolaan BUMDes. Dengan informan penelitian yaitu Kepala Desa dan Pengelola BUMDes. Hasil penelitian 1) BUMDes di Desa Papar mempunyai payung hukum sejak dibanggunya BUMDes di Desa Papar. 2) Sumberdaya Manusia yang ada dalam pelaksanaan program BUMDes ini secara kualitas sangat kurang dan sumberdaya finansial juga cukup kurang. 3) Kurangnya Sosialisasi. 4) Adanya dukungan pemerintah terhadap BUMDes. 5) Komunikasi dilakukan dimana saja dan hanya jika ada kepentingan. 6) Implementasi BUMDes belum berjalan secara optimal.

Kata Kunci: *BUMDes, Implementasi, Masyarakat.*

Pendahuluan

Desa merupakan salah satu tempat yang potensial bagi perekonomian suatu negara. Didesalah banyak potensi yang bisa dikembangkan, selain itu juga banyak sumber daya alam yang tersedia didalamnya. Dan sebelum pemerintah menyadari hal tersebut banyak desa yang yang seharusnya bisa dikembangkan menjadi tertinggal. Namun ketika pemerintah sekarang sudah menyadari akan besarnya potensi desa yang begitu besar maka diterbitkan sebuah kebijakan yakni Otonomi Daerah maka banyak daerah yang memanfaatkan hal tersebut untuk mengembangkan wilayahnya terutama desa. (Bintarto, 2013 dan salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Serta pada penelitian yang pernah dilakukan bahwa Bumdes lebih memfokuskan terhadap potensi penghasilan yang cukup berkembang uang telah dirasakan dan berdampak signifikan dalam pemasukan perekonomian BUMDes yang mana pemasukan ini akan digunakan untuk menambah asset desa maupun pengembangan desa. (Musyafak Faris dan Sukarno, JPAP Vol 5. No.2)

Badan usaha milik desa atau yang biasa disebut BUMDes adalah usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki desa melalui penyertaan modal langsung yang berasal dari kekayaan desa. BUMDes lembaga yang digadang – gadang sebagai kekuatan yang akan bisa mendorong terciptanya peningkatan kesejahteraan dengan cara menciptakan produktifitas ekonomi bagi desa dengan berdasar pada ragam potensi yang dimiliki desa. (berdesa.com, 2018).

Pada dasarnya pendirian dan pengelolaan BUMDes adalah wujud dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel dan sustainable. Untuk itulah membutuhkan pengelolaan BUMDes yang serius agar bisa berjalan secara mandiri, efektif dan professional.

Desa Papar merupakan salah satu desa di Kabupaten Kediri yang mempunyai karakteristik dan potensi wilayah yang berbeda – beda, baik potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, serta infrastruktur penunjang bangunan jika dibandingkan dengan beberapa desa yang ada di kabupaten Kediri hal ini menunjukkan adanya berbagai produk unggulan yang secara potensial dapat dikembangkan. Namun potensi sumberdaya ini tampaknya masih belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan dan dikembangkan secara optimal, karena masih terbatasnya informasi teknologi dan informasi pasar serta kekuatan ekonomi yang diperlukan untuk mengembangkan wilayah tersebut, serta lemahnya akses masyarakat terhadap peluang – peluang bisnis yang ada. Desa Papar merupakan desa memiliki posisi yang strategis menjadi perlintasan titik antar kota membuat masyarakat umum melewati jalan Desa Papar yang dimana di Desa Papar terdapat pasar tradisional yang begitu ramai hingga malam yang membuat orang yang melewati jalan tersebut menginginkan singgah. Sehingga pemerintah desa memiliki keinginan agar bagaimana caranya Desa Papar ini bukan hanya menjadi daerah lintasan semata akan tetapi menjadi daerah singgahan orang – orang yang melintas di Desa Papar ini. Maka dari itu pemerintah desa berinisiatif membangun dan mengembangkan BUMDes untuk menjadi penggerak ekonomi desa dan memajukan ekomi kreatif masyarakat. (Pemerintah Desa Papar, 2020).

Pengelolaan BUMDes di Desa Papar ini berusaha untuk semaksimal mungkin mengelola dan menajemen dengan baik. Meski baru berdiri 31 Maret 2017 silam. Walaupun BUMDes di Desa Papar ini masih terbilang baru tapi pemerintah desa dan pengelola BUMDes sangat berupaya untuk mengembangkan BUMDes ini. Program-program di Desa ini memanglah tidak banyak, meski hanya memiliki empat (4) program bisa berjalan lancar meskipun banyak hambatan hambatan da nada 1 program yang begitu terhambat.

Program-program tersebut diantaranya:

- a) Pengelolaan gedung serba guna p4s desa papar
- b) Persewaan kios
- c) Persewaan alat pertanian mesin tanam
- d) BKD (Bank Perkeriditan Desa)

Dari semua program itu yang paling utama dan berkembang adalah persewaan kios karena persewaan kios sendiri menjadi pendapatan terbesar untuk BUMDes dan persewaan kios program yang paling berkembang dibandingkan program-program yang lain.

Tujuan dari penelitian ini Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Implementasi program BUMDes di Desa Papar Kabupaten Kediri untuk menumbuhkan dan mengembangkan ekonomi kreatif masyarakat dan Untuk mengetahui apa program BUMDes ini bisa menumbuhkan ekonomi kreatif masyarakat.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dan telaah dokumen yang dari pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta dari berbagai sumber yang relevan dan media internet. Infroman dalam penelitian ini adalah Kepala Desa dan Pengurus BUMDes.

Lokasi penelitian ini mengambil lokasi di Desa Papar Kabupaten Kediri. Penelitian ini dilakukan di wilayah tersebut karena wilayah tersebut memiliki BUMDes dan berdirinya BUMDes sudah cukup lama ada beberapa program BUMDes disana tapi program tersebut masih kurang berjalan dan banyak kendala.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Ada enam variabel menurut van meter van horn, yang mempengaruhi kinerja kebijakan tersebut, yaitu: mengenai ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi, dan yang terakhir yaitu lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Berikut ini peneliti akan membahas lebih lanjut terkait analisis hasil penelitian.

Ukuran dan tujuan kebijakan. Berdasarkan latar belakang didirikannya BUMDes di Desa Papar dibentuk atas dasar untuk kemajuan desa. Hal ini juga didukung dengan keadaan desa yang strategis untuk membentuk suatu program seperti kios-kios yang bisa digunakan untuk sentra kuliner bagi pengendara yang lewat dan program simpan pinjam yang bisa digunakan masyarakat desa maupun pengusaha di desa. Program BUMDes di Desa Papar berdiri pada tahun 2017 dan dengan dasar hukum sendiri telah di amanatkan di dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2005 Tentang Desa, serta peraturan Bupati Kediri No. 7 Tahun 207 Tentang BUMDes.

Sumber Daya, Kondisi sumber daya manusia dalam pelaksanaan BUMDes di Desa Papar yaitu sifatnya relawan dan tidak ada gaji tetap. Sehingga sangat sulit mencari mencari orang-orang yang betul-betul mau bekerja untuk desa. Maka dari itu orang-orang dalam kepengurusan BUMDes adalah orang-orang yang bersosial yang mau bekerja untuk desa, namun sayangnya dari mereka ada yang belum paham betul mengenai teknologi sehingga sebagian apa yang mereka lakukan belum tersentuh kecanggihan teknologi. Secara terori van meter van horn sendiri manusia merupakan sumberdaya terpenting dalam menentukan suatu kebijakan proses implementasi karena sebagai implementator suatu kebijakan tersebut.

Sedangkan sumberdaya finansial. Terkait sumberdaya finansial, dana yang dipakai untuk membangun BUMDes ini sebagian besar merupakan dana bantuan dari pemerintah. Subsidi dana yang didapatkan adalah dan dari desa dan hasil dari program-program BUMDes seperti yang sudah dijelaskan diatas yaitu persewaan kios-kios yang hasilnya bisa diputar ulang untuk pemasukan BUMDes dan pelaksanaan program BUMDes lain. Akan tetapi selain sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain seperti finansial. Karena mau tidak mau, ketika sumberdaya manusia yang kompeten telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik.

Karakteristik Agen Pelaksana, untuk mewujudkan BUMDes terbentuk disuatu desa bukanlah suatu hal yang mudah, karena terkadang masyarakat desa yang cenderung masih tradisionalakan menghambat kearah pembangunan desa. Maka inisiatif pemerintah untuk mebangun BUMDes di seluruh desa akan sulit untuk terwujud maka itu banyak hal dari segi pembangunan yang haru dibenahi dulu. Apalagi jika pola piker masyrakata masih menganut oleh budaya dan adat istiadat yang kuno, sehingga perlu ada perubahan mindset

Kurangnya sosialisasi dari pemerintah baik dari pemerintah daerah maupun dari pemerintah desa. Dari pemerintah daerah sangat jarang melakukan sosialisasi khusus tentang BUMDes. Sedangkan pemerintah desa, belum sepenuhnya melakukan sosialisasi mengenai program BUMDes kepada Masyarakat, sehingga sebagian masyarakat tidak mengetahui program yang dijalankan oleh BUMDes.

Sikap Para Pelaksana, Dan dalam pengenalam BUMDes ke desa- desa, pemintah Kabupaten sebagai pelaku utama pelaksana program BUMDes menunjukkan sikap atau tindakannya ke desa-desa.

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atai tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Maka dalam penelitian ini, sikap yang ditampilkan adalah sikap penerimaan dari berbagai pihak. Untuk pemerintah kabupaten Kediri sendiri sudah memberikan perhatian melalui sosialisasi dan pelatihan manajemen pengelolaan BUMDes untuk mendukung jalannya BUMDes di desa-desa. Akan tetapi, sayang sekali program ini baru menyentuh beberapa desa saja, belum dilakukan untuk seluruh desa di Kabupaten Kediri.

Untuk pemerintah desa sendiri juga memberikan perhatiannya ke BUMDes karena BUMDes sendiri juga dibawah naungan desa dan dengan adanya BUMDes ini juga akan memajukan desa.

Untuk pengelolala BUMDes sendiri sangat kurang perhatiannya ke BUMDes mungkin Karena mereka juga bekerja tidak digaji. Sehingga mereka bekerja jika perlu dan memiliki waktu yang cukup senggang. Untuk itu seharusnya pemerintah desa maupun pengelola BUMDes mengajak kelompok desa seperti karangtaruna untuk bergabung mengelola BUMDes bersama. Apalagi dengan wabah covid seperti seharusnya ada perhatian terhadap persewaan kios-kios karena menjadi pusat bergerumunnya warga.

Sejauh ini memang ada perhatian karena adanya wabah covid tetapi itupun perhatian dari pemerintah daerah seperti selalu diawasi satpol PP dan adanya pos penjagaan polisi namun pos penjagaan polisi hanya sementara tidak bertahan lama.

Komunikasi antarorganisasi, Jelas koordinasi sangat dibutuhkan agar pelaksanaan program BUMDes dapat berjalan lancar, ini semua agar tidak ada tumpang tindih tugas dari masing-masing stakeholder sehingga tugas pokok dan fungsi dari setiap pihak yang terkait harus sudah memahami.

Dalam pelaksanaan kebijakan program BUMDes, koordinasi berperan sangat penting. Karena, kebijakan program BUMDes merupakan kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan semua elemen, mulai dari lembaga setempat, pihak dunia usaha, dan masyarakat. Koordinasi juga sangat dibutuhkan agar Kebijakan Program BUMDes dapat berjalan, ini semua agar tidak ada tumpang tindih tugas dari masing-masing stakeholder sehingga tugas pokok dan fungsi dari setiap pihak yang terkait harus sudah memahami.

Koordinasi dan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah di Desa Papar dilakukan sesuai dengan kebutuhan baik itu komunikasi dengan pemerintah daerah maupun dengan lembaga-lembaga yang ada di desa. Begitu juga dengan pelaksanaan operasional BUMDes dengan Pemerintah desa dan lembaga desa lainnya melakukan komunikasi secara kebutuhan saja tanpa ada jadwal khusus. Karena kegiatan desa sendiri tidak bisa ditebak, kadang kegiatan bisa banyak kadang juga kosong, sehingga komunikasi sendiri dilakukan secara fleksibel. Hal ini menunjukkan tidak ada pola komunikasi yang baik dalam berkoordinasi antar pemerintah desa, pelaksana BUMDes dan lembaga desa.

Aktifitas tiap pelaksana berbeda-beda, sehingga komunikasi yang dilakukan tidak pasti kapan dilakukan dalam satu waktu. Maka dari itu mereka melakukan komunikasi disaat komunikasi itu dibutuhkan dimana saja dan kapan saja tanpa tebentur hari kerja dan ruang kerja. Hal ini juga dapat membangun ataupun menumbuhkan kekeluargaan antar lembaga desa, sehingga pekerjaan tidak terlalu formal dilakukan namun tetap berjalan.

Proses pertanggungjawab dari BUMDes ini masih kurang karena masih kurang karena pengelola BUMDes sendiri melakukan komunikasi jika memang adaperlu saja tidak ada pertemuan rutin untuk membahas BUMDes dan mempertanggungjawabkan jika ada permasalahan maupun kendala-kendala di BUMDes.

Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Jika dilihat dari lingkungan ekonomi yang ada di Desa Papar pada saat sebelum adanya BUMDes mayoritas mata pencaharian petani dengan lingkungan pedesaan yang hijau sebagai lahan pertanian mereka. Meski memiliki kehidupan yang sederhana namun keasrian lingkungan membuat masyarakat betah tinggal didesanya sendiri. Kabupaten Kediri mengalami kemajuan yang cukup pesat, sehingga Kabupaten Kediri perlahan dimasuki investor-investor yang membangun seperti maal, supermarket, rumah makan, pabrikpabrik dan lain sebagainya dan perlahan lahan pertanian masyarakat digusur untuk mebangun pembangunan. Akan tetapi mesi lahan pertanian mereka digusur untuk dibangun suatu bangunan, namun masyarakat dan pemerintah desa tentu tidak diam saja, sehingga mereka mencari pekerjaan lain dan memanfaatkan keadaan yang ada dengan ikut bekerja dengan para [engusaha yang berada dilingkunagn desa. Dengan keadaan seperti ini, maka Pemerintah Desa bermusyawaaah dan membuat suatu program untuk membantu masyarakat yaitu melalui BUMDes ini.

BUMDes di Desa Papar ini membantu masyarakat untuk bisa menjadi penegusaha dengan adanya program simpan pinjam dan penyewaan kios-kios yang ada.

Lingkungan politik juga yang tidak terlepas dari pemerintah baik di daerah maupun di desa cukup mendukung jalannya BUMDes dari pemerintah daerah.

Lingkungan sosial masyarakat Desa ini juga mendukung jalannya program BUMDes ini, dengan mayoritas pedagang maupun jasa, masyarakat tentu membutuhkan bantuan dari pemerintag desa untuk bisa mengembangkan usahanya dan memperbaiki taraf hidupnya.

Kesimpulan

BUMDes di Desa Papar mempunyai payung hukum sejak dibangunnya BUMDes di Desa Papar. Sumberdaya Manusia yang ada dalam pelaksanaan program BUMDes ini secara kualitas sangat kurang. Dari segi kualitas, sumberdaya yang ada tidak terlalu faham IT sehingga masih minim paham teknologi. Sumberdaya finansial yang ada masih belum memenuhi dalam pelaksanaa program BUMDes, karena dana yang dikucurkan pemerintah daerah maupun desa dalam bentuk bantuan tidak sesuai dengan jumlah masyarakat yang membutuhkan, para pelaksana berharap ada bantuan dana yang cukup sehingga bisa memberdayakan masyarakat lebih banyak lagi dan menambah fasilitas yang ada. Apalagi program yang paling diandalkan hanya ada pada kios jadi pendapatan program BUMDes yang utama ada pada pesewaan kios.

Kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh para lembaga desa, terutama para pelaksana BUMDes. Dalam komunikasi yang mereka lakukan belum memiliki pola komunikasi yang baik dan tidak ada jadwal rutin pertemuan para lembaga desa untuk membicarakan BUMDes, komunikasi dilakukan hanya pada saat urgent saja. Kurangnya sosialisasi program BUMDes ini baik sosialisasi pemerintah daerah ke desa-desa mengenai kebijakn BUMDes maupun sosialisasi pemerintah desa kepada masyarakat desa mengenai program BUMDes yang dijalankan desa sehingga masyarakat tidak nurut saja sama apa yang dilakukan oleh pengurus BUMDes. Belum ada pemasukan untuk kas desa dari BUMDes dikarenakan program kerja BUMDes karena tidak semua program berjalan dan BUMDes sendiri masih dalam tahap pengembangan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang peneliti ajukan berupa rekomendasi yaitu sebagai berikut. Agar tidak ada perbedaan payung hukum lagi padahal di dalam daerah yang sama sebaiknya kedua desa menjalakan atau mendakan pertemuan maupun kerjasama jga guna meningkatkan kemajuan BUMDes. Melakukan penyegaran pengurus dengan melakukan pergantian pengurus yang mengganti pengurus dengan keahlian bidangnya dan juga dilakukan penambahan staff pembantu agar pekerjaan yang ada tidak terbengkalai karena kekurangan pegawai. Melakukan kerjasama yang baik dengan pengusaha dan pengembang. Sebagai desa yang tak jauh dari kota dan menjadi jalan utama antar kota, desa harus bisa memanfaatkan hal ini untuk bisa melakukan kerjasama dengan para pengembang untuk bantuan dana dalam bentuk CSR misalnya maupun bentuk kerjasama lain yang tentunya hal ini akan membantu pelaksanaan program BUMDes di Desa Papar dan Desa Minggiran dan juga perlu diadakan pelatihan juga bagi para pelaksana operasional BUMDes agar mereka lebih mengenal teknologi dengan lebih baik lagi, dan tentu ini akan sangat membantu pelaksanaan BUMDes. Menambah perhatiannya ke pengelolaan BUMDes terutama disaat ini lagi terjadi wabah covid. Meningkatkan dan memperkuat pola komunikasi antar lembaga desa dengan melakukan pertemuan rutin bulanan untuk membahas perkembangan BUMDes sehingga perkembangan BUMDes dapat diketahui oleh segala pihak yang ada didesa. Melakukan sosialisasi lebih intensif lagi agar masyarakat desa bisa menegtahui program BUMDes yang dilaksanakan oleh BUMDes sehingga tidak ada kesalah fahaman antara masyarakat dan pemerintah desa. Dan masyarakat tidak hanya mengiyakan apa saja yang dilakukan oleh pengelola BUMDes. Selain itu perlu diadakan sosialisasi pula ke desa-desa di Kabupaten Kediri, agar desa yang belum mengerti BUMDes bisa faham dan tertarik untuk mendirikan BUMDes di Desanya. Agar lebih meningkatkan pendapatan BUMDes agar juga ada pemasukan untuk kas Desa sehingga peran BUMDes lebih terlihat sebagai badan usaha terumata untuk peningkatan ekonomi kreatif masyarakat.

Untuk Implementasi Program BUMDes di Desa Papar ini tidak bisa dibilang tidak berhasil karena masih banyak hambatan dan permasalahan yang dihadapi BUMDes. Terutama untuk sumberdaya sendiri terutama sumberdaya manusianya dimana pengelola BUMDes sendiri masih buta akan teknologi. Komunikasipun mereka hanya berkomunikasi jika perlu dan tidak ada pertemuan rutin.

Daftar Pustaka

- berdesa.com. (2018, juli 28). *Informasi Lengkap BUMDes*. Retrieved juni 25, 2020, from Berdesa: <http://www.berdesa.com>
- Bintarto. (2013). *Pengertian Desa*. Retrieved juni 25, 2020, from Negeri Pesona: <http://www.negeripesona.com>
- Kompasiana. (2019, november 11). *BUMDes dan Berdirinya*. Retrieved juni 25, 2020, from kompasiana: <http://www.kompasiana.com>
- Musyafak Faris. Sukarno. Analisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pengelolaan Aset Desa di Desa Putat Lor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik (Studi Kasus di BUMDes Desa Putat Lor). *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 1233.
- Pemerintah Desa Papar. (2020). *Info BUMDes Desa Papar*. Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri: Desa Papar.
- Pemerintah Desa Papar. (2020). *Info Desa Papar*. Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri: Desa Papar.